



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/ PW.01/33/2022, tanggal 1 Maret 2022 perihal penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04.Kpts/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PK.01-BA/3313/2022 tanggal 13 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KARANGANYAR
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022.

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU																	
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	a. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Koordinasi ZI Pembentukan Tim Kerja b. Risalah Rapat Koordinasi ZI Pembentukan Tim Kerja c. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Pleno					√									Tim Manajemen Perubahan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6												7		
				d. SK Tim Kerja ZI Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar				√											
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI, menyosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	a. Undangan, Daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi ZI Penyusunan Rencana Aksi					√										
				b. Risalah Rapat Koordinasi ZI Penyusunan Rencana Aksi					√										
				c. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Pleno						√									
				d. SK Rencana Aksi ZI Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar							√								

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
				e. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Sosialisasi Rencana Aksi ZI					√								
				f. Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Karanganyar					√								
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM (per-triwulan/per-semester)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	a. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi Pembangunan ZI					√		√			√	√		
				b. Risalah Rapat Evaluasi Pembangunan ZI					√		√			√	√		
				c. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Pleno					√		√			√	√		
				d. Dokumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan ZI					√		√			√	√		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
				e. Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan ZI						√		√				√	√
				f. Dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan ZI						√		√				√	√
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Daftar hadir				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Banner KPU Karanganyar "BERES" (Pelayanan Bccik dan Budaya Kerja Resik)				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	a. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Koordinasi ZI : Penetapan Role Model Pembangunan ZI				√									
				b. Risalah Rapat Koordinasi ZI : Penetapan Role Model Pembangunan ZI				√									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
				c. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Pleno				√									
				d. SK Role Model Pembangunan ZI yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar				√									
II Penataan Tata Laksana																	
1	Prosedur Operasional Standar (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	a. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Karanganyar b. Screenshot / foto ketersediaan SOP c. Dokumen SOP d. Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi SOP						√	√						
										√	√						
										√	√						
										√	√						
																	Tim Penataan Tata Laksana

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6												7	
				e. Risalah Rapat Evaluasi SOP						√	√							
2	E-Office Pemanfaatan Aplikasi Presensi	Operasionalisasi Manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Surat Edaran KPU terkait Pelaporan harian masa Covid 19 dan Draft juknis	a. Aplikasi presensi berbasis google form		√												
				b. Penggunaan mesin Fingerspot		√												
				c. Aplikasi laporan kinerja harian ASN KPU Karanganyar berbasis google form		√												
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan	a. Website KPU Kabupaten Karanganyar, Media Sosial KPU Kabupaten Karanganyar (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok)		√												
				b. Website JDIH, Media Sosial JDIH (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)		√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6												7	
				c. e-PPID berbasis website		√												
				d. e-RPP berbasis website		√												
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT								√						
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Karanganyar menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kabupaten Karanganyar menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemilikan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan														
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten	a. Undangan, Daftar hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi PPID		√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6												7		
			Karanganyar	b. Risalah Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPID	√														
				c. Laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tahun 2021	√														
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM																			
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai (SE Sekjen Nomor 939 tanggal 12 April 2021)				√											Tim Penataan Sistem Manajemen SDM/ASN
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI	SK Penempatan, Pengumuman CPNS				√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja CPNS dan OS	Dokumen SKP CPNS dan laporan Tahunan OS				√									
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SPMT Rotasi Internal dan SK	√												
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SPMT Rotasi Internal dan SK	√												
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai		√											
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Karanganyar ke Bagian Diklat				√									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai	Usulan diklat/bimtek dari KPU Kabupaten Karanganyar ke Bagian Diklat				√									
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assesment pegawai	Prosentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai		√											
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti		√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6												7	
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja semester	√													
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	SK Satyalencana dan SK penetapan pegawai teladan	√													√
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimple mentasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai		√												
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja																	
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar memberikan pengarahannya dan menandatangani RKA-KL 2022	RKA-KL 2022	√												Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Karanganyar		√											
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja							√						
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Karanganyar	√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6												7	
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	√													
		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	√													
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2021	LAKIP (LKj) KPU Kabupaten Karanganyar tahun 2021 tepat waktu	√													
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2021	LAKIP (LKj) KPU Kabupaten Karanganyar tahun 2021 tepat waktu	√													
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2021	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP (LKj) 2021	√													
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP	Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP (LKj)	√													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
V PENGUATAN PENGAWASAN																	
1	Pengendalian Gratifikasi	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Foto spanduk, baliho, roll banner, dan lemari gratifikasi	√												Tim Pengawasan
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	a. SK Unit Pengendalian Gratifikasi, b. Laporan Hasil Monitoring Pengendalian Gratifikasi, Semester II Tahun 2021	√												
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Karanganyar	a. Salinan SK Satgas SPIP	√												
				b. Salinan SK SOP Penyusunan Kartu Kendali	√												
				c. Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Dokumen penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6												7			
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	√															
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	a. Undangan, Daftar hadir Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP		√														
				b. Risalah Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP		√														
				c. Dokumentasi Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPIP		√														
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Karanganyar	Foto Brosur Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat		√														

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten/Kota						√							
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Karanganyar	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan						√		√					√
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS						√							
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/inter nalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Inspektorat	Undangan, daftar hadir, risalah/ laporan dan dokumentasi rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan					√								

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1																	
		Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Karanganyar melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Karanganyar						√							
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)						√							
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Karanganyar	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan						√							√
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan						√							√

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6												7
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																	
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	√											Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	√												
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	√												
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait				√									
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial		√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6												7								
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	SK Pegawai Berprestasi 2021																					
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan																					
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	a. halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Kabupaten Karanganyar;																					
				b. SK SOP Penanganan Hoax																					

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN BULAN												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6												7	
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	Hasil Survey				√										
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Screenshoot dari website					√									
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya					√									

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smaragung Wibowo